

**DISEMINASI DISKOMINFO DALAM MENINGKATKAN  
PELAYANAN INFORMASI MELALUI WEBSITE DI KABUPATEN  
ENREKANG**

Evisarita Rasyid

NPP. 29.1378

*Asdaf Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan  
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email : [ecaevi26@gmail.com](mailto:ecaevi26@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** In realize good governance, government enforce Constitution Number 14 of 2008 concerning Openness Information Public . in line with that , practice E-government initiated for provide service information more public \_ easy , fast , effective and efficient . **Purpose :** study this for analyze how strategy dissemination information as well as in management information in amount a lot , obstacles faced \_ and effort is done by Government Regency Enrekang in service information for Public Enrekang . **Method :** This research uses descriptive qualitative with approach inductive technique data collection used on study this is interviews , observations , and documentation. **Results / Findings :** study show that implementation strategy dissemination information in increase service information to Public through website yet fully effective . There is several obstacles that hinder the implementation of services information through website, namely the lack of source power infrastructure and means infrastructure that has not support , the quality of human resources is still low , and the minimum supervision carried out . Thus , the implementation activity in service information to Public not yet achieved with good . However , implementation \_ strategy dissemination information in management service information already walk good seen from availability website on all OPD in the District Enrekang .

**Keywords:** E-Government , service public , strategy dissemination information , good governance

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dalam mewujudkan *good governance*, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejalan dengan itu, praktik *E-government* dinisiasi *untuk* menyediakan pelayanan informasi publik yang lebih mudah, cepat, efektif dan

efisien. **Tujuan** : penelitian ini untuk menganalisis bagaimana strategi diseminasi informasi serta dalam pengelolaan informasi dalam jumlah banyak, kendala yang dihadapi dan upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pelayanan informasi bagi masyarakat Enrekang. **Metode** : penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan** : penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi diseminasi informasi dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui *website* belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pelayanan informasi melalui *website*, yaitu kurangnya sumber daya infrastruktur dan sarana prasarana yang belum mendukung, kualitas SDM masih rendah, serta minimnya pengawasan yang dilakukan. Sehingga, pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat belum tercapai dengan baik. Namun, pelaksanaan strategi diseminasi informasi dalam pengelolaan pelayanan informasi sudah berjalan baik dilihat dari tersedianya *website* pada semua OPD di Kabupaten Enrekang.

**Kata Kunci:** E-Government, pelayanan publik, strategi diseminasi informasi, good governance

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Teknologi pada saat ini, terus berkembang baik dari segi bentuk, ukuran, kecepatan, kemampuan akses multimedia maupun jaringan komputer (Urumsah 2015). Di era modernisasi seperti sekarang ini, komunikasi dan pertukaran data dalam jaringan komputer menjadi semakin mudah. Hadirnya teknologi internet berupa *website* atau *world wide web* dan media sosial dengan berbagai teknologi pendukung lainnya telah mendukung layanan komunikasi dan informasi yang lebih mudah dan efisien.

Penyampaian informasi sangat penting dilakukan dengan menggunakan metode interaksi sosial dari masing-masing individu atau kelompok. Tidak adanya komunikasi dalam proses penyampaian informasi menjadikan pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan komunikasi secara strategis dan terjadi dalam suatu badan publik. Keterbukaan informasi sesuai dengan penjelasan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa unit di bidang informasi, komunikasi dan atau kehumasan akan diberi tanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi dalam suatu badan publik.

Tingginya kebutuhan terhadap informasi dalam (Setiawan 2017:17) menjadi salah satu ciri dari kehidupan masyarakat di era digital. Pada era ini, informasi menjadi kebutuhan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Pemenuhan terhadap kebutuhan informasi dapat dengan mudah dipenuhi karena kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memungkinkan setiap orang dan instansi untuk menciptakan, menyebarkan, dan mengkonsumsi informasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan masing-masing.

Konsumsi informasi yang ditopang oleh kemajuan teknologi pada saat ini dapat mempermudah dalam pengaksesan, pengolahan serta pendayagunaan informasi secara cepat serta lebih efisien kepada masyarakat. Dalam (2017) pertemuan *Government Public Relations (GPR)*, *sharing* mengenai komunikasi pemerintah di era digital Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu mengajak seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, agar dapat menjalin hubungan antara masyarakat dengan pegawai pemerintah di daerah yang mampu lebih aktif dalam menggunakan *website* sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat. "Era komunikasi saat ini sudah berubah. Secara jumlah pengguna media sosial saat ini sudah banyak dan sudah digunakan sebagai jalur untuk berkomunikasi."

Penggunaan situs *web* telah membentuk dan mendukung cara-cara baru untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dalam penyediaan dan pengelolaan informasi dalam lingkup organisasi. *Website* menyediakan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui *online* (*online/jaringan*). Saat ini, masyarakat dihadapkan pada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan serta mengakses informasi melalui media elektronik dan yang paling berkembang pada saat ini adalah media sosial berupa *website*.

## **1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan di Kabupaten Enrekang, meski telah menjalankan program *E-government* dengan memanfaatkan *website* namun kurang tersampainya secara menyeluruh informasi karena kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pergerakan *Egovernment* Pada era yang modern saat ini yang sangat dibutuhkan dalam penyebaran informasi secara menyeluruh sehingga tersampainya informasi yang terbaru pada setiap harinya. Faktanya dapat dilihat dari data statistik pengunjung harian yang tersedia di *website* <https://enrekangkab.go.id>, nampak bahwa jumlah pengunjung website tersebut tidak stabil.

Serta di Kabupaten Enrekang masih ada daerah *blank spot* atau kondisi suatu tempat yang tidak tersentuh oleh akses internet ataupun jaringan menjadi salah satu faktor kurangnya distribusi layanan internet, karena daerah pegunungan dan daerah terpencil yang sulit diakses serta membutuhkan biaya yang besar untuk mengaksesnya. Kurangnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan *E-government* di Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, hal ini dibuktikan pada latar belakang pendidikan para Aparatur Sipil Negara di Kantor Dinas Diskominfo Enrekang hanya memiliki satu orang pegawai dengan latar belakang IT

*Website* milik instansi pemerintah daerah di Kabupaten Enrekang hanya dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk menerima informasi. Sementara itu, sarana penyampaian aspirasi masyarakat pemerintah belum berjalan maksimal. Padahal, untuk meningkatkan hubungan antarmasyarakat, harus ada pertukaran informasi baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Padahal, kemudahan interaksi antara pemerintah dan masyarakat penting dalam meningkatkan pelayanan publik.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penggunaan website sebagai layanan informasi bagi masyarakat. Referensi penelitian terdahulu ialah Risda Wulandari (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018) Skripsi berjudul “Strategi diseminasi Diskominfo dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat kecamatan Malili kabupaten Luwu timur”. Dalam penelitian ini menggunakan teori Informasi Organisasi oleh Karl Weick. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, pihak Diskominfo menggunakan berbagai macam strategi, yang pertama berkerjasama dengan berbagai macam media cetak dan media online lalu merangkul mereka sebagai media partner, yang kedua penyebaran informasi dalam bentuk videotron yang ada dalam bentuk videografis, fotografis, dan lain-lainnya. Selanjutnya Penelitian oleh Asriadi (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019)

Skripsi berjudul “Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota ParePare dalam menangani berita hoaks di Lembaga Penyiaran Publik” . Dalam penelitian ini menggunakan teori Agenda Setting oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972, 1993) serta teori Jarum *Hipodermik* oleh Hovland. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini Diskominfo sebagai pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan nilai tambah sebagai penyalur informasi dan mengurangi atau mencegah berita hoaks yang berkembang dimana masyarakat menyukai hal-hal yang menghebohkan pada dasarnya sangat berbahaya karena bias menjadi perilaku didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Skripsi berjudul “Peranan Diskominfo Kota Padang dalam membangun komunikasi public.” oleh Alhadi Syukri (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan teori Aspek Kegiatan Humas oleh Linggar Anggoro. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas komunikasi dan informatika Kota Padang belum bekerja maksimal dalam melaksanakan perannya dalam memberikan pelayanan informasi, motivasi dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat kota Padang. Dibuktikan bahwa masih banyak timbul kontroversi antara masyarakat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang sehingga hubungan masyarakat dengan pemerintahan kota Padang belum harmonis.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Untuk penelitian yang dilakukan peneliti sekarang, penelitian ini berjudul Diseminasi Diskominfo Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Melalui *Website* Di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan pelayanan informasi yang dilakukan oleh Dinas Diskominfo Kabupaten Enrekang

dalam meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat melalui *website*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi serta observasi yang dilakukan. Karena peneliti ingin mengetahui dan mendalami terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Istilah pendekatan merujuk pedoman penelitian yang dimulai dengan observasi kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi beberapa prinsip yang berkaitan dengan objek yang akan dikaji dan diamati. Pendekatan ini disesuaikan dengan objek yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang benar dan maksimal.

### **1.5. Tujuan**

Untuk dapat menganalisis informasi yang tersedia pada *website* <https://enrekangkab.go.id> menjadi sumber literasi yang menyediakan informasi publik bagi kebutuhan masyarakat serta mengetahui upaya diseminasi Diskominfo dalam menangani informasi yang diperoleh dalam jumlah yang besar. Dan dapat memahami cara dalam mengurangi ketidakpastian informasi yang diperoleh untuk pelayanan informasi kepada masyarakat melalui *website* <https://enrekangkab.go.id>.

## **II. METODE**

Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif karena data yang akan diambil oleh penulis disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan. Dezin dan Lincoln didalam moleong (2012:5) tentang penelitian kualitatif merupakan “penelitian dengan memakai latar belakang ilmiah, maksudnya mengartikan fenomena yang terjadi serta dilaksanakan dengan cara mengkaitkan berbagai metode yang ada”.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Bidang Aplikasi dan *E-Government*, Kepala Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan, Kepala Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi, Kepala Bidang Informatika, dan 10 Masyarakat Kabupaten Enrekang sebagai informan dalam penelitian ini agar dapat mengetahui serta menjawab permasalahan dalam peningkatan pelayanan informasi melalui *website*.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis diseminasi diskominfo dalam meningkatkan pelayanan informasi melalui *website* di Kabupaten Enrekang dengan menggunakan pendapat dari Karl Weick (2009) menyatakan bahwa Terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori yaitu: Organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi, Informasi yang diterima suatu organisasi berbeda dalam hal tingkat kepastiannya, Organisasi terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi ketidakpastian informasi Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3. 1. Informasi pada *website* <https://enrekangkab.go.id> menjadi sumber literasi bagi kebutuhan masyarakat**

## 1. Lingkungan yang strategis

Lingkungan dikelilingi serta dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang lebih modern dan maju serta menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu instansi yang merupakan tempat ataupun lokasi suatu instansi tersebut.

Lingkungan strategis dianalisa untuk mengetahui pengaruh serta pemilihan strategi yang sesuai dengan tantangan pada lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Enrekang guna mendorong terwujudnya visi dan misi yaitu:

Visi Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten

Enrekang adalah “Menjadi Pusat Data Informasi Komunikasi Yang Cepat, Terpercaya, Beretika Dan Bermartabat Untuk Mewujudkan Enrekang Maju Aman Dan Sejahtera”, Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan;

Misi Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Enrekang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi Informasi Telematika Dan Statistik Kabupaten Enrekang.
- c. Meningkatkan akses Informasi / Komunikasi Dan telematika melalui pemberdayaan dan pengembangan Multimedia dan Media massa;
- d. Meningkatkan mutu pelayanan informasi/komunikasi melalui pemanfaatan jaringan TIK.
- e. Meningkatkan penerapan E-Governance di Kabupaten Enrekang
- f. Meningkatkan pelayanan Informasi / Komunikasi yang lancar dan benar kepada masyarakat menuju terbentuknya Masyarakat Informatif.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi Diskominfo diperlukan suatu tindakan bersama untuk dapat melaksanakan segala program kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pada kenyataannya Kabupaten Enrekang terletak pada lingkungan daerah pegunungan yang mengakibatkan masih banyaknya daerah *blank spot* yang terjadi karena faktor topografinya yang sulit dikarenakan lokasinya berada diantara lembah atau pegunungan yang mengakibatkan akses komunikasi di wilayah tersebut sangat sulit. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan Bapak Masrul, SE.M.Si dalam wawancara diruangan beliau tanggal 14 Januari 2022 bahwa: “Akses komunikasi serta jaringan internet khususnya di Kabupaten Enrekang belum menyeluruh hal ini dapat terlihat pada daerah Kabupaten Enrekang dengan topografinya yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai yang mengakibatkan 27 kelurahan/desa yang masih dalam status daerah *blank spot* atau

kondisi suatu tempat yang belum tersentuh atau tidak terlingkupi sinyal komunikasi.”

Berdasarkan pada pernyataan dalam wawancara di atas hal ini dibuktikan dalam table

### 3.1 Data Daerah *Blank spot* di Kabupaten Enrekang

**Tabel 3.1 Data Daerah *Blank spot***

No.	Daerah/Desa <i>Blank spot</i>	Kelurahan/Desa	Jumlah
1.	Kecamatan Maiwa	Desa Tanete, Paladang, Matajang, Limbuang, Pasang, Puncak Harapan, Baringin, Tempe-tempe, Labuku, dan Soladua	10
2.	Kecamatan Cendana	Desa Pinrang, Lekkong, dan Panette	3
3.	Kecamatan Enrekang	Desa Tobalu, Kumadang, dan Lewaja	3
4.	Kecamatan Anggeraja	Desa Singki, Tindalun, Siambo, dan Salu Dewa	7
5.	Kecamatan Masalle	Desa Rampunan, Mundan, dan Tongkonan Basse	3
6.	Kecamatan Buntu Batu	Desa Ledan dan Desa Latimojong	2
7.	Kecamatan Bungin	Desa Bulu dan Desa Nating	2
Jumlah			27

Sumber Data: Diskominfo Enrekang

Berdasarkan pada table 3.1 menggambarkan bahwa 27 daerah *blank spot* yang ada di Kabupaten Enrekang dalam arti tidak mendapatkan akses jaringan. Hal ini disebabkan akses jaringan yang ada di Enrekang belum mampu menjangkau jaringan telekomunikasi karena kondisi alamnya yang berada dilembah dan pegunungan. Selain dari hambatan oleh topografi di Kabupaten Enrekang, pihak penyedia jaringan provider juga mempertimbangkan dalam faktor bisnis keuntungan yang diperoleh untuk pemasangan jaringan telekomunikasi dikarekanan kurangnya pengguna jaringan internet hal ini didukung dari data penduduk dari daerah *blank spot*. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan informasi yang menyeluruh serta dalam penyampaian kondisi yang terjadi disana. Salah satu cara agar dapat keluar dari zona *blank spot* yaitu pihak penyedia jasa telekomunikasi harus memasang jaringan atau tower.

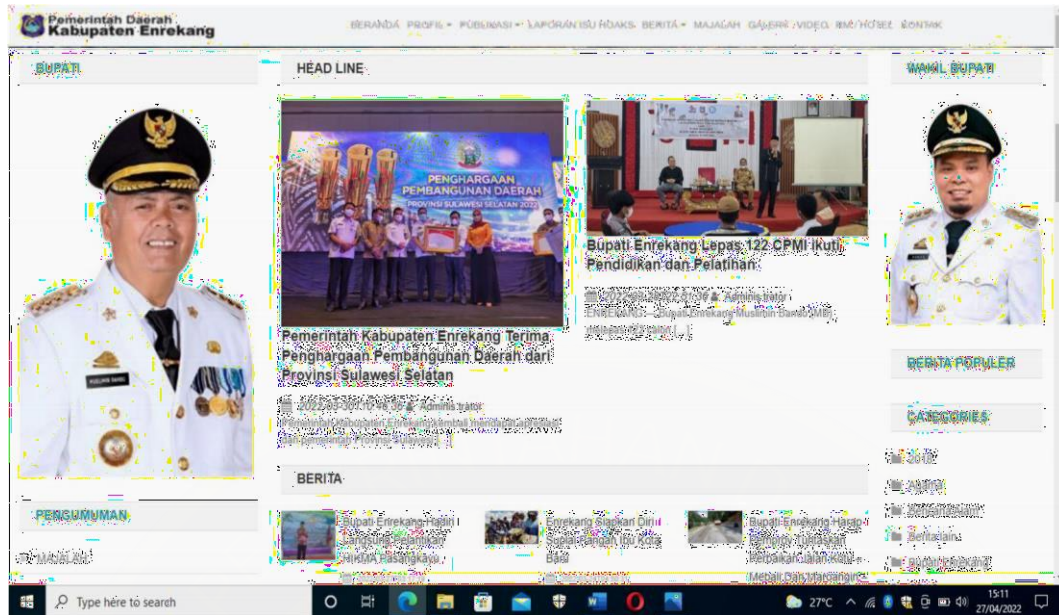
2. Pelayanan Informasi serta literatur digital bagi masyarakat

Perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan informasi telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat memenuhi segala jenis kebutuhan informasi yang tersedia, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik serta media sosial yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Kabupaten Enrekang. Kondisi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus memiliki kemampuan atau kapasitas dalam melayani tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan informasi serta untuk mencapai visi dan misi yang dibangun, melalui implementasi yang dilakukan serta membenahi apa yang menjadi kekurangan dari pihak Diskominfo Kabupaten Enrekang serta telematika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat dicapai. Berdasarkan hal tersebut peluang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai lembaga teknis daerah dan pengelolaan teknologi informasi untuk menjadi konsultan perencanaan. Kemampuan atau kapasitas tersebut tergantung pada sarana dan prasarana pendukung, antara lain lingkungan, gedung/kantor yang representatif dan peralatan teknologi telematika, baik yang digunakan untuk menunjang aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan baik LAN, WAN dan pemanfaatan intranet dalam pelayanan informasi di Kabupaten Enrekang.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang memberikan akses serta mendukung pelayanan informasi secara online, serta implementasi dari pihak Diskominfo Kabupaten Enrekang dalam keterbukaan serta pelayanan informasi bagi masyarakat dengan melakukan pelayanan informasi melalui website <https://enrekangkab.go.id> yang dapat diakses melalui platform internet. Penggunaan website juga digunakan sebagai penyedia kabar resmi untuk menghindari dan sekaligus membasmi berita hoax yang beredar dikalangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada laman website <https://enrekangkab.go.id>







**Gambar 3.1**  
**Halaman Website <https://enrekangkab.go.id>**

Terlihat pada laman *website* <https://enrekangkab.go.id> sudah banyak memfasilitasi fitur layanan informasi yang beragam mulai dari beranda profil sampai dengan laporan isu berita hoax untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat di Kabupaten Enrekang.

### 3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien, diperlukan sumber daya manusia yang handal sebagai pengelola sistem. Diskominfo Kabupaten Enrekang sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, integritas, semangat tinggi, dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Selain itu, kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menjalankan tugas serta fungsi pada bidang informasi dan teknologi juga masih sangat kurang. Seharusnya kepemilikan pegawai berbasis teknologi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di Kabupaten Enrekang yang bergerak pada bidang informasi dan teknologi.

Adapun daftar pegawai Diskominfo Kabupaten Enrekang dengan latar belakang pendidikan. Sumber daya manusia yang menunjang perihal *e-government* juga harus dipenuhi kebutuhan mendasar mengenai Teknologi Informasi yang harus dimiliki oleh semua pegawai pada OPD khususnya di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang untuk dapat mendukung penuh jalannya serta terlaksananya kegiatan pemerintahan e-government.

**Tabel 3.2**  
**Daftar Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten**  
**Enrekang Dengan Latar Belakangnya**

No.	NAMA	JABATAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
1	2	3	4
1.	HASBAR,S.IP,M.Si	Kepala Dinas	Sosial
2.	ASWAN ANJAS,S.Sos,M.A.P	Sekretaris	Sosial
3.	ISWANTO,A.Md	Kasubbag Perencanaan	Ekonomi
4.	SUARNI MABU,S.Sos	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Sosial
5.	LUBIS,S.Sos	Kabid Humas dan Komunikasi Publik	Sosial
6.	Drs. H. Abdul Asis	Kabid Informatika	Sosial
7.	Rismawati B. S.Kom	Kabid Aplikasi dan <i>e-government</i>	Teknologi Informasi
8.	Baharuddin. S.Pd	Kabid Persandian dan Statistik	Pendidikan
9.	Muh.Syarif, S.Sos	Kasi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Hubungan Kerjasama Antar Lembaga	Sosial
10.	Saripa Nugrawati,S.Sos. M.I.Kom	Kasi Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sosial
11.	Dra. Mariati Rede	Kasi Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik	Ekonomi
12.	Armin, S.H	Kasi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi	Hukum
13.	Masrul, SE.,M.Si	Kasi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan	Ekonomi
14.	Hj. Andi Irma,S.H.,M.A.P	Kasi Persandian	Hukum
15.	Arif Suherman, S.Pd	Kasi Statistik Sektoral	Pendidikan

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dari 16 Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang hanya 1 (satu) orang yang memiliki latar belakang pendidikan teknologi informatika yang memahami dan menguasai perihal teknologi. Sebagai sebuah organisasi yang bergerak mengembangkan bidang teknologi dan informatika memiliki pegawai yang memahami dan menguasai teknologi dan informatika merupakan sebuah keharusan guna mempermudah jalannya tugas dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih baik dan lebih tepat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang.

### **3.2. Upaya Diseminasi Diskominfo dalam menangani informasi yang diperoleh dalam jumlah besar**

#### **1. Kemampuan Organisasi Dalam Memahami Informasi Yang di Terima**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting khususnya pada bidang penyebaran informasi publik di Kabupaten Enrekang. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengadakan koordinasi terlebih dahulu dan hasil akhir keputusan ada pada Kepala Dinas serta kerjasama dengan memanfaatkan media online dalam upaya mewujudkan kegiatan yang bersifat teknologi dalam penyebaran informasi serta pelayanan informasi kepada masyarakat Kabupaten Enrekang yang terkini. Diskominfo mengharapkan adanya kerja sama dengan OPD dalam memberikan keterbukaan informasi sehingga pihak Diskominfo mampu menampung serta memahami berbagai informasi yang diterima agar lebih efektif dan efisien dalam menyebarkan informasi yang terkini kepada masyarakat.

#### **2. Strategi Pengelolaan Serta Pelayanan Informasi**

Strategi pengelolaan informasi yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan informasi, pihak Diskominfo telah menciptakan wadah dalam pelayanan informasi kepada publik secara luas dan menyeluruh kepada semua instansi OPD di Kabupaten Enrekang agar terciptanya keterbukaan informasi bagi masyarakat serta Diskominfo Kabupaten Enrekang sangat berharap dalam mendukung pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang dalam media sosial dan website <https://enrekangkab.go.id>.

Dalam meningkatkan pelayanan informasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat dengan strategi melakukan strategi diseminasi informasi publik dengan cepat dan tanggap dalam menyaring informasi dengan memanfaatkan internet dengan mendukung terwujudnya Enrekang “smart city” serta terciptanya kualitas informasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat.

#### **3. Informasi Terkini**

Pembahasan mengenai informasi, tidak ada informasi yang bersifat netral. Suatu informasi selalu diciptakan berkaitan dengan konteks pola pikir tertentu untuk melayani kebutuhan -kebutuhan baik yang bersifat nasional, organisasi maupun kebutuhan personal atau pribadi. Dalam mendukung pelayanan Informasi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang harus tepat sasaran dalam kebutuhan informasi masyarakat. Pemanfaatan media teknologi dalam pelayanan informasi dapat menunjang ketubuhan informasi masyarakat untuk mendapatkan informasi setiap saat dengan mengikuti perkembangan zaman serta informasi menjadi suatu hal yang penting dalam keberlangsungan kehidupan.

### **3.3. Upaya mengurangi ketidakpastian informasi yang diperoleh untuk pelayanan informasi melalui website <https://enrekangkab.go.id>**

#### **1. Upaya untuk mengurangi ambiguitas informasi**

Adanya ketidakjelasan dalam penyampaian serta penyebaran informasi menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan informasi, diseminasi dapat berangkat dari kekurangan pemahaman akan sumber informasi. Wawasan tentang sumber informasi yang didapatkan bukan hal yang mustahil belum dimiliki dan dihayati secara luas oleh para instan komunikasi sehingga dapat menimbulkan kurang tepat dalam menempatkan informasi yang bersangkutan.

Pelayanan informasi pada *website* Diskominfo diungkapkan adapun syarat utama insan komunikasi dan informasi adalah memiliki pengetahuan yang memadai tentang ragam sumber informasi. Pemahaman akan ragam informasi tersebut dapat membantu mengakomodasi, menganalisis, mendesiminasi informasi lebih lanjut untuk dapat diolah menjadi sebuah informasi yang akurat.

#### **2. Keputusan yang sesuai dan disepakati**

Dalam suatu organisasi ataupun instansi perlu adanya koordinasi yang dilakukan antara lembaga untuk mengambil serta mengetahui keputusan akhir secara bersama. Mengenai pelayanan serta penyebaran informasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang perlu adanya koordinasi dalam mengolah informasi yang diterima dari berbagai instansi ataupun informasi yang diterima dalam jumlah banyak dalam bidang humas dan komunikasi publik kemudian diolah menjadi informasi yang akurat dan jelas untuk kebutuhan informasi kepada masyarakat kemudian dipublikasikan melalui media sosial ataupun *website*.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Literasi penelitian terdahulu menjadi sasaran temuan utama bagi peneliti agar menjadi bandingan serta temuan yang berbeda dengan penelitian terdahulu, seperti halnya pada penelitian Risda Wulandari (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018) berjudul "Strategi diseminasi Diskominfo dalam

meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat kecamatan Malili kabupaten Luwu timur”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dengan referensi terdahulu dengan menggunakan teori Informasi Organisasi oleh Karl Weick. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, pihak Diskominfo menggunakan berbagai macam strategi dalam penelitian ini strategi yang digunakan oleh peneliti dilihat dari faktor yang terjadi pada saat melaksanakan observasi di lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada strategi yang akan dilakukan oleh pihak Diskominfo Kecamatan Malili, namun penelitian yang dilakukan berfokus pada beberapa faktor yang ada, diantaranya daerah *blank spot*, tidak sesuainya latar pendidikan pegawai yang ada di Diskominfo Kabupaten Enrekang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan hasil berfokus pada Hasil penelitian dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, pihak Diskominfo menggunakan berbagai macam strategi, yang pertama berkerjasama dengan berbagai macam media cetak dan media online lalu merangkul mereka sebagai media partner, yang kedua penyebaran informasi dalam bentuk videotron yang ada dalam bentuk videografis, fotografis, dan lain-lainnya.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara langsung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diseminasi Informasi yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang sepenuhnya belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlihat kurangnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai pada latar pendidikan teknologi dan pelayanan informasi yang belum menyeluruh terlihat dari masih adanya 27 daerah kelurahan/desa di Kabupaten Enrekang.
2. Beberapa hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan strategi diseminasi informasi adalah:
  - a. Sumber Daya Manusia  
Hambatan dalam pelaksana pelayanan informasi melalui *website* oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam menguasai teknologi dan informatika pada pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang.
  - b. Fasilitas sarana dan prasarana  
Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pelayanan informasi melalui *website* seperti kurangnya perangkat keras (*hardware*) dalam bentuk pemasangan jaringan telekomunikasi provider yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang.
  - c. Ketidaktepatan pemilihan pejabat  
Banyak terjadi ketidaksesuaian pejabat yang memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu dengan latar belakang yang dimiliki oleh seorang pegawai. Permasalahan

ini membuat pegawai membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi barunya.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kabupaten Enrekang pada pelayanan informasi melalui *website*, dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :
  - a. Pelatihan Pegawai  
Pegawai OPD yang mengikuti pelatihan tidak dibebani dengan tugas yang lain dan memberikan pelatihan kembali atas materi yang didapatkannya.
  - b. Melakukan pelaporan sebagai bahan evaluasi  
Setiap Sub Bagian memberikan laporan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.
  - c. Rapat menentukan rencana strategi dinas  
Menentukan rencana strategis dinas, rencana kerja, penetapan kinerja beserta indikasinya sehingga semua kegiatan dapat terukur dengan tepat dan dapat dijadikan pedoman serta melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah agar terciptanya sinergi yang baik.
  - d. Membangun komitmen  
Untuk membangun Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Kabupaten Enrekang dapat menjalankan serta memegang teguh komitmen bersama berkembang dengan baik secara berkelanjutan dan menjadi contoh bagi instansi lain.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten Enrekang.

**Arah Masa Depan Penelitian.** Penulis memfokuskan hasil penelitian pada strategi diseminasi yang dilakukan oleh pihak Diskominfo Kabupaten Enrekang dalam pelayanan informasi melalui *website* <https://enrekangkab.go.id> dalam memenuhi layanan informasi publik bagi masyarakat Kabupaten Enrekang sehingga kedepannya diharapkan *website* <https://enrekangkab.go.id> yang dikelola oleh pihak Diskominfo Kabupaten Enrekang dapat menjadi platform unggulan dalam memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Enrekang.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih yang utama ditujukan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan lahir batin dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu untuk melakukan penelitian dengan baik. Kemudian diucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan setiap saat, menjadi panutan dan selalu mendukung setiap usaha dan langkah yang penulis lakukan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan serta mengarahkan dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian ini. Kepada pihak-pihak terkait yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Kabupaten Enrekang yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis dalam rangka melaksanakan penelitian ini. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam suksesnya pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asiz, Muh. 2019. "DISKOMINFO Enrekang Masih Ada 27 Desa Di Kabupaten Enrekang Blank Spot." *tribunnews.com*.  
<https://www.google.co.id/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2019/09/06/diskominfo-enrekang-masih-ada-27-desa-di-kabupaten-enrekang-blank-spot>  
(September 3, 2021).
- Asriadi. 2019. "Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota ParePare dalam menangani berita hoaks di Lembaga Penyiaran Publik."
- Indonesia Internet Provider Association. 2020. "Internet User Survey 2019-2020." *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia* 74: 1.  
<https://apjii.or.id/content/read/104/503/BULETIN-APJII-EDISI-74---November2020>.
- John W. Creswell. 2004. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kothari, C.R. 2012. *Research Methodology: An Introduction. In Research Methodology: Methods and Techniques*.
- Kusumajanti, Mega Purnama, and Anjang Priliantini. 2018. "Diseminasi Informasi Publik Oleh Humas Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Public Awareness (Studi Kasus Terkait Larangan Penggunaan Pukat Hela Dan Pukat Trawl Pada Nelayan Di Kepulauan Seribu)." *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* 7(3): 116–26.
- Lukman, Sampara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Moleong, Lexy J. 2012a. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.. Remaja Rosdakarya. :5
- . 2011b. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.. Remaja Rosdakarya.
- . 2011c. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.. Remaja Rosdakarya.
- Morrissan. 2009. *Teori Komunikasi Organisasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, W. 2017. "Era Digital Dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan." *Seminar Nasional Pendidikan*: 1–9.
- Syukri, Alhadi. 2017. "Peranan Diskominfo Kota Padang dalam membangun komunikasi public."
- . 2012b. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Urumsah, Dekar. 2015. "Factors Influencing E-Services Adoption: Processes by Firms in Developing Nations, Singapore: Emerald Group Publishing Limited, 5–524.
- Wulandari, Risda. 2018. "Strategi diseminasi Diskominfo dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat kecamatan Malili kabupaten Luwu timur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Yazid, Tantri Puspita, Nurjana & Susanti Hevi. 2015:829. “Pemanfaatan Website Sebagai Media Komunikasi Untuk Mewujudkan Good Governance.” Universitas Riau.

### **Jurnal**

Heryana, Ade. 2018. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara”, Universitas Esa Unggul. Jawa Barat : 4.

Indonesia Internet Provider Association. 2020. “Internet User Survey 2019-2020.” Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 74: 1. <https://apjii.or.id/content/read/104/503/BULETIN-APJII-EDISI-74--November2020>.

Kusumajanti, Mega Purnama, and Anjang Priliantini. 2018. “Diseminasi Informasi Publik Oleh Humas Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Public Awareness (Studi Kasus Terkait Larangan Penggunaan Pukat Hela Dan Pukat Trawl Pada Nelayan Di Kepulauan Seribu)”, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika 7(3): 116–26.

Yazid, Tantri Puspita, Nurjana & Susanti Hevi. 2015. “Pemanfaatan Website Sebagai Media Komunikasi Untuk Mewujudkan Good Governance”, Universitas Riau. Riau.

### **Peraturan Perundang - Undangan**

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

### **Modul**

<https://www.google.co.id/amp/s/makassar.tribunnews.com/amp/2019/09/06/Diskominfo-enrekang-masih-ada-27-desa-di-kabupaten-enrekang-blank-spot>. Diskominfo Enrekang Masih Ada 27 Desa Di Kabupaten Enrekang Blank Spot. Jumat, 3 September 2021 <https://www.beritasatu.com/digital/696577/apjii-pengguna-internet-diindonesiacapai-1967-juta>. APJII: Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta. Jumat, 3 September 2021 <https://apjii.or.id/content/read/104/503/BULETIN-APJIIEDISI-74---November2020>. “Indonesia Internet Provider Association. (2020). Internet User Survey 20192020. In Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia” Jumat, 3 September 2021 [https://kominfo.go.id/content/detail/9712/pemerintah-daerah-harusaktif-gunakanmedia-sosial/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/9712/pemerintah-daerah-harusaktif-gunakanmedia-sosial/0/berita_satker). Pemerintah Daerah Harus Aktif Gunakan Media Sosial. Jumat, 3 September 2021



